

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latif. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagir Manan. 1999. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- , 2003. *Teori dan Politik Konstitusi*. Edisi. Cet. 3. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bagir Manan dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Darumurti Krishna. 2012. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Erna Tri Rusmala. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram.
- Fitriani Ahlan Sjarif. 2019. *Aradhana Sang Guru Perundang-undangan: Kumpulan Tulisan Memperingati Ulang Tahun Ke-70 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.* Cetakan pertama. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Gunardi. 2022. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press.
- Hotma P. Sibuea. 2010. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

-----, 2007. *Hukum Tata Negara Darurat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*. Cetakan ke-1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Joko Widarto. 2020. *Diktat Ilmu Perundang-undangan*. Jakarta: Universitas Esa Unggul.

K. Pamuji dan D. Raharjo. 2023. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto: UNSOED Press.

Maria Farida Indrati. 2018. *Ilmu Perundang-undangan Jilid I: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Jakarta: Kanisius.

Moh. Mahfud MD. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-7. Jakarta: Rajawali Press.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Philipus M. Hadjon et al. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Prajudi Admosudirjo. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

-----, 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.

- , 2009. *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*. Cetakan pertama. Yogyakarta: FH UII Press.
- , 2014. *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- , 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, Cetakan ke-11. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sadono Sukirno. 2008. *Mikroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Edisi 1, Cetakan ke-10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Solly Lubis. 2008. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Yusak Elisa Reba. 2024. *Kedudukan dan Fungsi Instruksi Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Surabaya: Global Aksara Pers.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Pembentukan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 95/PUU-XI/2013.

D. Jurnal

Aju Putrijanti. 2015. "Kewenangan serta Obyek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 44. No. 4.

Ali Marwan Hsb. 2019. "Keberadaan Instruksi Presiden sebagai Produk Hukum di Indonesia". *Jurnal Reformasi Hukum*. Vol. XXIII. No. 1.

Bivitri Susanti. 2017. "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Jentera*. Vol. 1. No. 2.

C. Aditya. 2022. "Instrumen Pengendalian Parkir Swasta di Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya". *Jurist-Diction*. Vol. 5. No. 2.

Fitriani A. Sjarief. 2019. "Ketidaktepatan Cara Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-undangan melalui Mekanisme Mediasi berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2019". Dalam *Aradhana Sang Guru Perundang-undangan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Giovanni Oklay Clarence Rawung, Tommy F. Sumakul, dan Maarthen Y. Tampanguma. 2025. "Kajian Yuridis Terhadap Pembatasan Lamanya Masa Kepemimpinan Kepala Desa Berdasarkan Perspektif Demokrasi Konstitusional". *Lex Crimen*. Vol. 13. No. 5.

- Hamid S. Attamimi. 1993. *Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan*. Makalah disampaikan pada Pidato Purna Bakti Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 20 September.
- Hasanuddin Hasim. 2017. "Hierarki Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu Sistem". *Madani Legal Review*. Vol. 1. No. 2.
- I Gede Mallik Satya Devangga, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ida Ayu Putu Widiati. 2021. "Keberlakuan Yuridis Peraturan Protokol Kesehatan di Provinsi Bali". *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2. No. 1.
- I Gede Sujana. 2024. "Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945". *Indonesian Journal of Law Research*. Vol. 2. No. 1.
- Kaharudin dan Riska Ari Amalia. 2022. "Analisis Unsur Diskresi dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 10. No. 1.
- Mayolla Octavia dan Laila Mauluda Tunnisa. 2025. "Analisis Yuridis Kedudukan Instruksi Presiden dalam Sistem Hukum Nasional". *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Vol. 4. No. 2.
- Mei Susanto. 2016. "Hak Budget DPR dalam Pengelolaan Keuangan Negara (Budget Right In State Finance Management)". *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 5. No. 2.
- Pricilia Elisya Siahaya, Hengky A. Korompis, dan Youla O. Aguw. 2021. "Hak Prerogatif Presiden dalam Pengangkatan Duta Besar Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945". *Lex Administratum*. Vol. IX. No. 6.
- Saksi R.S. Rakia. 2021. "Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 10. No. 2.
- Wahyu Prianto. 2024. "Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky". *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 2. No. 1.
- Wawan Mulyawan dan Widia Alia. 2020. "APBN dan Pendapatan Nasional". *SALAM: Islamic Economics Journal*. Vol. 1. No. 2.

Yutirsa Yunus dan Reza Faraby. 2014. "Reduksi Fungsi Anggaran DPR dalam Kerangka *Checks and Balances* (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013)". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7. No. 2.

E. Skripsi/Tesis/Disertasi

Mhd. Lutfi AR. 2022. *Pengujian Peraturan Kebijakan Menurut Regulasi Administrasi Pemerintahan*. Disertasi. Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Retno Wulandari. 2014. *Kedudukan Instruksi Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

F. Internet

Agnes Theodora. "Efisiensi Anggaran Dipakai untuk MBG dan Danantara, Apa Dampaknya ke Rakyat?". *Kompas.id*.
<https://www.kompas.id/artikel/efisiensi-anggaran-dipakai-untuk-mbg-dan-danantara-apa-dampaknya-ke-rakyat>.

CNBC Indonesia. "Prabowo Ungkap Penghematan Rp750 T, Hasilnya Dibagi ke MBG dan Danantara". *CNBC Indonesia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20250219130824-4-611871/prabowo-ungkap-penghematan-rp750-t-hasilnya-dibagi-ke-mbg-danantara>

Fitri Novia Heriani. "Dekan FH Universitas Andalas Sebut Efisiensi Anggaran Cacat Hukum, Begini Alasannya!". *Hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dekan-fh-universitas-andalas-sebut-efisiensi-anggaran-cacat-hukum--begini-alasannya-lt67bad582c8828/?page=1>.

Hanni Sofia. “Paradoks Efisiensi Anggaran di Era Kabinet Merah Putih”. *Antara News*, <https://www.antaraneews.com/berita/4643097/paradoks-efisiensi-anggaran-di-era-kabinet-merah-putih>.

Heru Haetami. “Pakar: Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Anggaran Bertentangan dengan Hukum, Rentan Digugat”. *KBR.id*.
<https://kbr.id/articles/ragam/pakar-inpres-1-2025-tentang-efisiensi-anggaran-bertentangan-dengan-hukum-rentan-digugat>.

Muamar Azmar Mahmud Farig. “Rule of Law dalam Situasi Krisis: Mengawal Batas Kekuasaan Aparat dalam Negara Demokratis”, *Marinews*.
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/rule-of-law-dalam-situasi-krisis-mengawal-batas-kekuasaan-0wY>.

